

2020

INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO





2020

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020**

ISBN : -
Nomor Publikasi : 71080.2019
Katalog BPS : 4R102004.7108
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 70 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Editor:

BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Dicetak Oleh:

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Raymond A. E. Kodoati, SE, M.Si

Naskah:

Meity Chintya Sinadia, SE.

Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.

Editor:

Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit:

Nabella Intan Karasta, S.Tr.Stat.

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

<https://sitarokab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Program pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020**. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Ondong Siau, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

Raymond A. E. Kodoati, SE, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
2. TINJAUAN UMUM	7
2.1 Taraf Kesejahteraan Rakyat	10
2.2 Penduduk Miskin	11
3. KEPENDUDUKAN	13
3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	16
3.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	17
3.3 Komposisi Penduduk	19
4. KESEHATAN	23
4.1 Derajat Kesehatan	26
4.2 Status Kesehatan	27
4.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	28
4.4 Penggunaan Jaminan Kesehatan	29
5. PENDIDIKAN	31
5.1 Status Pendidikan	34
5.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	35
5.3 Angka Melek Huruf	35
6. KETENAGAKERJAAN	37
6.1 Angkatan Kerja	40
6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Partisipasi Pengangguran Terbuka (TPT)	41
6.3 Status Pekerjaan	42
7. POLA KONSUMSI	45

8.	PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	51
8.1	Status Kepemilikan	53
8.2	Sumber Penerangan	54
8.3	Sumber Air Utama	55
8.4	Sarana Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK)	56
9.	KEMISKINAN	57
9.1	Persentase Kemiskinan	59
9.2	Garis Kemiskinan	60
9.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)	62
10.	SOSIAL EKONOMI LAINNYA	65
10.1	Akses Pada Informasi	67
10.2	Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Kelurahan dan Jumlah Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 15
Tabel 3.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 17
Tabel 3.3	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019* 18
Tabel 4.1	Persentase Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 29
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 34
Tabel 5.2	APM menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 35
Tabel 5.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca Menulis di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 36
Tabel 6.1	TPAK dan TPT menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 42
Tabel 6.2	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 43
Tabel 7.1	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 48
Tabel 7.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok

	Pengeluaran (Rupiah) di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019	49
Tabel 8.1	Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019 ...	56
Tabel 10.1	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin KRT dalam Penggunaan Teknologi Informasi Selama Tiga Bulan terakhir, 2019	68
Tabel 10.2	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019	69

<https://sitarokab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Sitaro menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin (Jiwa), 2019*	20
Grafik 4.1 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2010 – 2019	26
Grafik 4.2 Angka Kesakitan menurut Karakteristik di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019	27
Grafik 6.1 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Kepulauan Sitaro menurut Jenis Kelamin, 2019	41
Grafik 8.1 Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019	53
Grafik 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/Dll di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019	55
Grafik 9.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2010 – 2019	60
Grafik 9.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sitaro (Rupiah), 2010-2019	61
Grafik 9.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kabupeten Kepulauan Sitaro, 2010-2019	62

BAB 1

PENDAHULUAN

<https://sitirok.ab.bps.go.id>



1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia dalam hidupnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pemerintah telah menentukan strategi pembangunan yang ditekankan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, agar pencapaian kesejahteraan masyarakat lebih merata.

Banyak program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah di beberapa bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik, dan lain sebagainya. Namun, dengan adanya keragaman budaya, adat istiadat, sumber daya manusia, luas wilayah, serta potensi alam yang ada mengakibatkan pencapaian hasil-hasil pembangunan di masing-masing wilayah berbeda. Dalam hal pembangunan ini, kualitas penduduk atau sumber daya manusia yang ada memiliki peran penting dalam memajukan suatu daerah. Kualitas penduduk sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik internal maupun faktor eksternal meliputi suasana lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kebijakan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Untuk dapat menilai kualitas penduduk diperlukan indikator ataupun ukuran yang dapat menunjukkan kondisi penduduknya.

Badan Pusat Statistik dalam hal ini BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menerbitkan publikasi yang dapat

menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Indikator yang digunakan adalah indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lingkungan, dan lain-lain.

1.2 Maksud dan Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan publikasi ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2019.
2. Memberikan gambaran mengenai Kesehatan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro tahun 2019.
3. Memberikan gambaran mengenai Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2019.
4. Memberikan gambaran mengenai Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2019.
5. Memberikan gambaran mengenai Perumahan dan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2019.
6. Memberikan gambaran mengenai Pola Konsumsi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2019.
7. Memberikan gambaran mengenai Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2019.
8. Memberikan gambaran mengenai aspek Sosial Ekonomi Lainnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2019.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disajikan dalam beberapa bab sesuai dengan pengelompokan indikator ditambah pendahuluan sebagai bab 1 dan tinjauan umum sebagai bab 2. Indikator yang disajikan mencakup delapan indikator yang dijadikan judul bab dalam tulisan ini.

Adapun penyusunan bab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, maksud dan tujuan, dan sistematik penulisan.

Bab 2. Tinjauan Umum

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2019.

Bab 3. Kependudukan

Bab ini menjelaskan mengenai laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk.

Bab 4. Kesehatan

Bab ini mencakup mengenai derajat, status, pemanfaatan, dan penggunaan fasilitas kesehatan.

Bab 5. Pendidikan

Bab ini menjelaskan mengenai status pendidikan APM dan angka melek huruf.

Bab 6. Ketenagakerjaan

Bab ini mencakup mengenai angkatan kerja, TPAK, TPT, penyerapan tenaga kerja dan status pekerjaan.

Bab 7. Pola Konsumsi

Bab ini mencakup mengenai pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga selama tahun 2019.

Bab 8. Perumahan dan Lingkungan

Bab ini mencakup mengenai status kepemilikan, sumber penerangan utama, sumber air bersih utama, dan penggunaan MCK.

Bab 9. Kemiskinan

Bab ini menjelaskan mengenai persentase kemiskinan, garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Bab 9. Sosial Ekonomi Lainnya

Bab ini mencakup mengenai penggunaan teknologi informasi dan kemudahan dalam mengakses internet.

BAB 2

TINJAUAN UMUM

<https://sitirok.kab.bps.go.id>



Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal.

Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan indikator-indikator *input*, proses, dan *output* untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat, serta proses dan manfaat dari program tersebut pada tingkat individu, keluarga, dan penduduk.

Indikator *input* dan dampak tidak selalu sejalan. *Input* atau investasi dalam suatu program hanya akan memberikan dampak yang diharapkan jika implementasi program berjalan secara benar. Oleh karena itu, kesenjangan antara *input* dan dampak suatu program kesejahteraan rakyat sebaiknya dilihat sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu tingkat/tafah kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu, dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu: kependudukan, kesehatan, pendidikan, konsumsi rumah tangga, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan perumahan.

Setiap aspek disajikan secara terpisah dan merupakan bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat

dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

2.1 Taraf Kesejahteraan Rakyat

Taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara umum berkembang cukup baik, meskipun dalam konteks demografis Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit, yaitu hanya 66.403 jiwa pada tahun 2019 menurut hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. Cukup baiknya taraf kesejahteraan rakyat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro antara lain dapat dilihat dari tiga indikator yang berdampak untuk bidang kesehatan dan pendidikan, yaitu kenaikan Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi.

- Selama 2018-2019, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tercatat naik 0,40 tahun dari 70,14 pada tahun 2018 menjadi 70,54 tahun pada tahun 2019.
- Selama 2018-2019, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tercatat 8,57 pada tahun 2018 naik menjadi 8,75 tahun pada tahun 2019.
- Selama 2018-2019, angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengalami peningkatan, yaitu sebesar 11,51 tahun 2018 menjadi sebesar 11,64 pada tahun 2019.

2.2 Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang mempunyai dimensi luas. Di Indonesia dan di negara berkembang lainnya, kemiskinan juga merupakan “luka” tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan yang tengah berlangsung. Penyebab kemiskinan dapat bersifat struktural maupun non struktural. Tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 9,87 persen turun menjadi 9,56 persen.

BAB 3

KEPENDUDUKAN

<https://sitirok.ab.bps.go.id>



Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau yang sering disingkat SITARO merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak pada Koordinat 2°07'48'' - 2°48'36'' Lintang Utara dan 125°09'36'' - 125°29'24'' Bujur Timur.

Kabupaten Kepulauan Sitaro berbatasan dengan Laut Maluku di sebelah timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe di utara, Kabupaten Minahasa Utara di selatan, dan Laut Sulawesi di barat.

Secara administratif, luas Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah 275,95 km², yang terdiri dari 47 pulau di mana sebanyak 12 pulau merupakan pulau berpenghuni, dan sisanya pulau belum berpenghuni.

Kabupaten Kepulauan Sitaro terdiri dari sepuluh kecamatan dengan 93 kelurahan atau desa dan 377 lingkungan/ lindungan.

Keadaan kependudukan yang ada sangat memengaruhi dinamika pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk dalam pembangunan mempunyai peran sebagai pelaku (subjek) dan juga sebagai tujuan (objek). Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu

Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan dan Jumlah Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Jumlah SLS
(1)	(2)	(3)
Biaro	5	21
Tagulandang Selatan	5	17
Tagulandang Tagulandang Utara	15	65
Siau Barat Selatan	6	14
Siau Timur Selatan	7	23
Siau Barat	14	49
Siau Tengah	12	37
Siau Timur	4	13
Siau Barat Utara	16	116
Siau Barat Utara	8	22
Total	93	377

Sumber: Kabupaten Kepulauan Sitaro Dalam Angka, 2020

meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data jumlah penduduk berasal dari proyeksi jumlah penduduk dengan data dasar dari Sensus Penduduk. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan karena bila tidak terkendali akan menimbulkan masalah baru bagi suatu daerah. Untuk itu perlu pemantauan jumlah penduduk di suatu wilayah. Pemantauan itu dapat didukung dengan penyajian data penduduk yang akurat.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dapat menjadi potensi yang baik dalam pembangunan daerah, akan tetapi laju pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi juga dapat menjadi *boomerang* bagi pemerintah apabila kualitas penduduknya rendah. Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan maka pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 3.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Indikator	2019
(1)	(2)
Luas Wilayah (km ²)	275,95
Jumlah Penduduk (jiwa)	66.403
-Laki-laki	32.740
-Perempuan	33.663
Rasio Jenis Kelamin	0,97
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	0,27

Sumber: Kabupaten Kepulauan Sitaro Dalam Angka, 2020

Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk Tahun 2019, jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah sebesar 66.403 jiwa yang tersebar di sepuluh kecamatan. Penduduk laki-laki berjumlah 32.740 jiwa dan perempuan 33.663 jiwa, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 0,97. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki, kemudian untuk laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2019 sebesar 0,27 persen.

3.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlihat pada Tabel 3.3 masih belum merata. Persebaran penduduk masih terkonsentrasi di empat kecamatan, yaitu Siau Timur, Tagulandang, Siau Timur Selatan, dan Siau Barat dengan persentase masing-masing 24,25 persen; 18,25 persen; 12,20 persen; dan 12,14 persen. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Siau Tengah yang hanya diisi 2,82 persen penduduk.

Tabel 3. 3 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019*

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)
Biaro	5,25	185,42
Tagulandang Selatan	6,81	231,76
Tagulandang	18,25	241,87
Tagulandang Utara	5,85	240,01
Siau Barat Selatan	6,33	308,34
Siau Timur Selatan	12,20	373,03
Siau Barat	12,14	255,90
Siau Tengah	2,82	175,59
Siau Timur	24,25	318,98
Siau Barat Utara	6,10	246,70

Sumber: Kabupaten Kepulauan Sitaro Dalam Angka, 2020

Dilihat dari kepadatan penduduk, Kabupaten Kepulauan Sitaro mempunyai kepadatan penduduk 266,66/km². Hal ini berarti bahwa di setiap 1 (satu) km² wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro terdapat sebanyak 266-267 jiwa penduduk. Kepadatan penduduk biasa terkonsentrasi di pusat perekonomian yang umumnya mempunyai segala fasilitas yang dibutuhkan penduduk untuk menjalani hidup. Di tingkat kecamatan, kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Siau Timur dengan 318,98/km². Kemudian untuk daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Siau Tengah dengan 175,59/km².

Ketimpangan kepadatan penduduk dapat menjadi indikasi awal bahwa daerah dengan kepadatan tertinggi memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lain dari segi fasilitas dan infrastruktur, pembangunan ekonomi serta pembangunan manusianya. Dalam jangka

panjang, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, seperti memprioritaskan pembangunan yang dilaksanakan di daerah yang masih terisolir, dan daerah dengan sarana prasarana yang masih minim.

Catatan: * Data merupakan hasil registrasi pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

3.3 Komposisi Penduduk

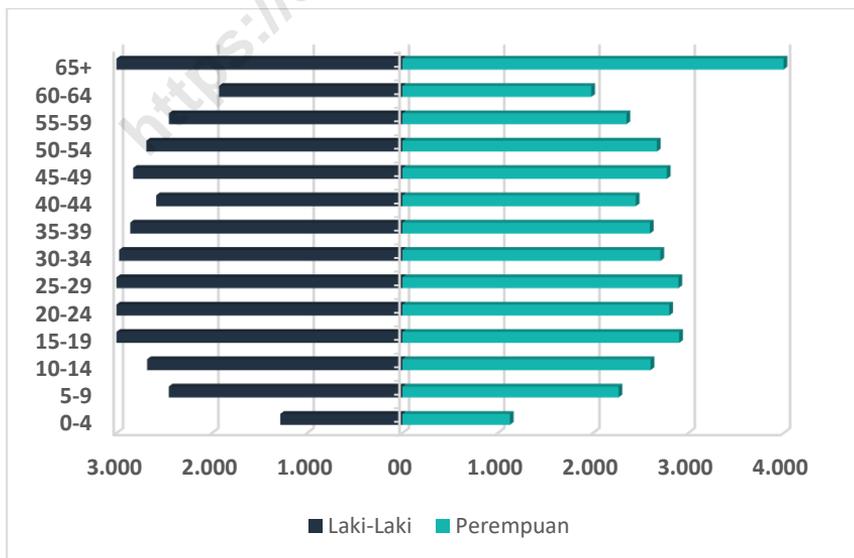
Dari struktur umur penduduk di suatu daerah, dapat diketahui apakah penduduk di wilayah tersebut berstruktur umur muda atau berstruktur umur tua. Dikatakan berstruktur umur muda apabila kelompok penduduk yang berusia di bawah 15 tahun jumlahnya lebih dari 35 persen dan besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 3 persen. Sebaliknya dikatakan berstruktur umur tua apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kurang dari 35 persen dan persentase penduduk di atas 65 tahun sekitar 15 persen (Mantra, 1985).

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan penduduk. Beberapa permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya. Informasi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dapat memberikan gambaran yang

jelas mengenai seberapa besar jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Di sisi lain, informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat memberikan gambaran berapa jumlah penduduk yang termasuk dalam penduduk golongan tua ataupun golongan muda.

Struktur umur penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah di berbagai bidang maupun dalam dunia bisnis. Keperluan penduduk terhadap suatu pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut umur karena sepanjang siklus kehidupan, kebutuhan selalu berubah-ubah. Grafik 3.1 memberikan gambaran angka absolut dari distribusi penduduk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2019.

Grafik 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Sitaro menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin (Jiwa), 2019*



Sumber: Kabupaten Kepulauan Sitaro Dalam Angka, 2020

Grafik piramida penduduk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2019 di atas menunjukkan bahwa persentase

terbesar penduduk laki-laki berada pada kelompok umur 15–19 tahun. Kemudian untuk persentase penduduk perempuan yang terbesar berada di kelompok umur 65+ tahun. Piramida tersebut juga menunjukkan bahwa semakin bertambahnya interval kelompok umur maka semakin kecil persentase jumlah penduduknya. Selain itu, dari perbandingan jumlah penduduk menurut kelompok umur, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki struktur umur muda. Jumlah penduduk muda masih memberikan kontribusi terbesar, dengan penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) sebanyak 72,96 persen.

Catatan: * Data merupakan hasil registrasi pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

BAB 4

KESEHATAN

<https://sitirokab.bps.go.id>

Kesehatan merupakan masalah bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu masalah kesehatan perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satu peran Pemerintah dalam bidang kesehatan adalah dengan melaksanakan berbagai program seperti penambahan tenaga kesehatan hingga ke semua wilayah serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, pembantu yang semuanya harus mampu di jangkau oleh masyarakat luas, tidak hanya dijangkau secara biaya tetapi juga secara akses dan lokasi. Pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdapat 2 Rumah Sakit Umum, 13 Puskesmas Umum, dan 14 Puskesmas Pembantu.

Kualitas fisik penduduk juga merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Kualitas itu sendiri dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur status kesehatan penduduk antara lain adalah Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit. Kemudian untuk mengetahui derajat kesehatan dapat dilihat dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH).

Sementara itu, untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, sarana dan prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

4.1 Derajat Kesehatan

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Nilai AHH dipengaruhi oleh banyak variabel, baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Pengaruh variabel tersebut dapat bersifat langsung atau tidak, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu tertentu, dan dapat bekerja sendiri atau bersinergi dengan variabel lain.

Grafik 4.1 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2010 - 2019



Sumber: *sulut.bps.go.id*, 2020

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga sangat penting dipantau perkembangannya. AHH tinggi mengindikasikan tinggi derajat kesehatan suatu wilayah. Dari tahun 2010 AHH Kabupaten Kepulauan Sitaro selalu mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 mencapai 70,54. Angka tersebut berarti bahwa bayi yang

lahir pada tahun 2019 mampu bertahan hingga usia 70 – 71 tahun, dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan tidak ada yang berubah.

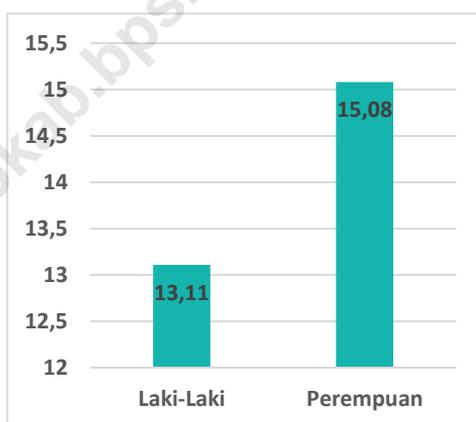
4.2 Status Kesehatan

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan status kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan. Angka tersebut merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan pada kesehatan sehingga aktivitas kesehariannya dapat terganggu. Apabila semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan maka derajat kesehatan di daerah tersebut masih rendah. Begitu juga

sebaliknya, apabila angka kesakitan penduduk rendah maka derajat kesehatan di daerah tersebut sudah cukup baik.

Berdasarkan Grafik 4.2 terlihat bahwa angka kesakitan penduduk yang berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Banyaknya penduduk yang mengalami

Grafik 4.2 Angka Kesakitan menurut Karakteristik di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

keluhan kesehatan sebagian besar diduga sebagai akibat dari efek perubahan cuaca yang tidak menentu dan siklus tahunan. Keluhan kesehatan yang dialami penduduk menyebabkan terganggunya aktivitas penduduk sehingga dapat mempengaruhi produktivitas penduduk tersebut.

4.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap penduduk. Selain ketersediaan, kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan tersebut juga merupakan hal yang wajib untuk diperoleh penduduk. Pada tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Sitaro, perempuan pernah kawin di usia 15 - 49 tahun yang sudah pernah melahirkan di fasilitas kesehatan sebanyak 84,91 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan dan kemudahan dalam mengaksesnya sudah cukup baik.

Selain fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga berperan penting dalam tingkat kesehatan masyarakat. Salah satu tenaga kesehatan yang sangat berpengaruh adalah penolong kelahiran. Keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu saat proses kelahiran sangat dipengaruhi oleh penolong kelahiran tersebut. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik jika dibandingkan tenaga non medis seperti dukun beranak, *family*, atau lainnya. Pada tahun 2018, persentase perempuan pernah kawin di usia 15 - 49 tahun yang sudah pernah melahirkan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah 90,51 persen melahirkan dengan bantuan tenaga medis. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang keselamatan bayi dan ibu sudah sangat tinggi, serta ketersediaan tenaga medis penolong persalinan juga sudah cukup memadai.

Catatan: Data menggunakan data tahun 2018 dikarenakan data tahun 2019 tidak tersedia.

4.4 Penggunaan Jaminan Kesehatan

Salah satu pembangunan nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melalui penyediaan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Jaminan kesehatan

Tabel 4.1 Persentase Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Jenis Kelamin	Menggunakan Jaminan Kesehatan
(1)	(2)
Laki-laki	22,88
Perempuan	28,96

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

dari pemerintah ini bertujuan agar kebutuhan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa persentase penggunaan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum optimal. Untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki, persentase penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat jalan hanya sekitar 22,88 persen. Kemudian untuk penduduk berjenis kelamin perempuan juga masih belum optimal, yaitu sebesar 28,96 persen.

BAB 5

PENDIDIKAN

<https://sitarokab.bps.go.id>



Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Pembangunan pendidikan sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan, dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Pendidikan merupakan salah satu faktor kebutuhan dasar manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Pada tahap tertentu tingkat pendidikan dapat meningkatkan status sosial dalam kehidupan masyarakat. Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka melek huruf. Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa dibarengi dengan perbaikan sistem pendidikan. Gerakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi anak usia 7-15 tahun merupakan salah satu bentuk dari usaha yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya program wajib belajar, maka diharapkan mampu meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak usia pendidikan dasar, baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

5.1 Status Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan demografi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Jenis Kelamin	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Bersekolah			Tidak sekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	3,11	11,22	3,86	4,87	76,94
Perempuan	2,93	10,28	4,90	5,41	76,47

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Berdasarkan Tabel 5.1 terlihat bahwa penduduk usia lima tahun ke atas yang tidak/belum bersekolah di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki persentase sebesar 3,11 persen dan 2,93 persen. Sedangkan untuk penduduk usia lima tahun ke atas yang sudah tidak bersekolah lagi yaitu sebesar 76,94 persen pada jenis kelamin laki-laki dan 76,47 persen pada jenis kelamin perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro pernah mengenyam bangku pendidikan.

5.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Semakin tinggi APM menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan merata di seluruh Indonesia dan merata tiap jenjang atau tingkat pendidikan dari SD sampai SMA.

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni pada setiap jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA berada di atas nilai 70 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah cukup berhasil melaksanakan program wajib belajar. APM untuk jenjang SD/MI adalah sebesar 97,45 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 97 diantaranya bersekolah di jenjang SD atau MI.

Tabel 5.2 APM menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Jenjang Pendidikan	APM
(1)	(2)
SD/MI	97,45
SMP/MTs	77,31
SMA/SMK/MA	71,01

Sumber: Kabupaten Kepulauan Sitaro Dalam Angka, 2020

5.3 Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis, seseorang harus mempunyai kemampuan ini agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan

berpartisipasi dalam pembangunan. Indikator untuk melihat kemampuan tersebut yaitu angka melek huruf. Semakin besar angka melek huruf menggambarkan semakin bagus kualitas pendidikan daerah tersebut. Angka Melek Huruf (AMH) adalah angka yang menggambarkan persentase penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin ataupun huruf lainnya.

Kemampuan penduduk umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang dapat membaca dan menulis sangat tinggi. Pada tahun 2019, hampir seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas yang dapat

Tabel 5.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca Menulis di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Lainnya
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	99,95	0,92
Perempuan	99,61	1,41

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

membaca dan menulis atau lebih dari 99 persen. Apabila dilihat secara lebih dalam, penduduk umur 15 tahun ke atas yang berjenis kelamin laki-laki, 99,95 persen diantaranya mampu membaca dan menulis huruf latin serta 0,92 diantaranya mampu membaca dan menulis huruf lainnya. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan, jumlah penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin yaitu sebanyak 99,61 persen serta 1,41 persen diantaranya mampu membaca dan menulis huruf lainnya.

BAB 6

KETENAGAKERJAAN

<https://sitirok.ab.bps.go.id>



Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Ketersediaan lapangan pekerjaan dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktifitas tenaga kerja.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian. Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum dapat menjadi ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dikatakan berhasil. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain

banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi *output* produksi.

Adapun klasifikasi seseorang dikatakan telah memasuki usia kerja yaitu ketika seseorang tersebut telah berusia 15 tahun atau lebih. Jika seseorang tersebut terlibat dalam suatu pekerjaan atau terkategori sebagai pengangguran, seseorang itu termasuk dalam angkatan kerja. Yang dimaksud dengan pengangguran di sini ialah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, sudah merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

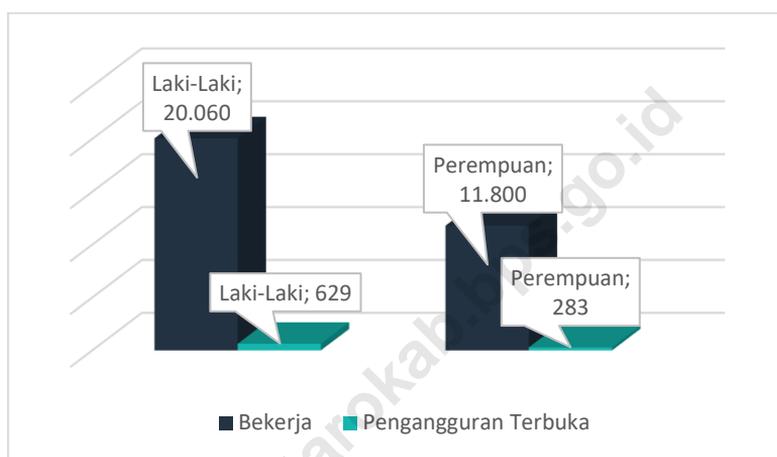
6.1 Angkatan Kerja

Penduduk yang masuk kedalam angkatan kerja dibagi kedalam dua bagian, yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2019 adalah sebanyak 31.860 jiwa, sedangkan penduduk yang masuk kedalam jenis pengangguran terbuka ada sebanyak 912 jiwa.

Grafik 6.1 menggambarkan jumlah penduduk Angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang tergolong bekerja maupun yang tergolong pengangguran terbuka menurut jenis kelamin. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa penduduk angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki yang bekerja ada sebanyak 20.060 jiwa, dan yang tidak bekerja sebanyak 629 jiwa. Kemudian untuk penduduk angkatan kerja yang

berjenis kelamin perempuan yang bekerja ada sebanyak 11.800 jiwa, dan masuk kedalam golongan pengangguran terbuka ada sebanyak 283 jiwa.

Grafik 6.1 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Kepulauan Sitaro menurut Jenis Kelamin, 2019



Sumber: Kabupaten Kepulauan Sitaro Dalam Angka, 2020

6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seperti diketahui bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro, jumlah penduduk yang masuk kedalam angkatan kerja adalah sebanyak 32.772 jiwa. Kemudian, untuk mengetahui partisipasi aktif angkatan kerja dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK dan TPT merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur besarnya jumlah angkatan

kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

Berdasarkan Tabel 6.1 dapat dilihat bahwa TPAK Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat dikatakan cukup tinggi yaitu sebesar 63,35. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Kepulauan Sitaro

Tabel 6.1 TPAK dan TPT menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Jenis Kelamin	TPAK	TPT
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	81,77	3,04
Perempuan	45,72	2,34
Total	63,35	2,78

Sumber: Kabupaten Kepulauan Sitaro Dalam Angka, 2020

termasuk angkatan kerja, dua sampai tiga orang diantaranya merupakan pencari kerja atau pengangguran.

yang berusia 15 tahun ke atas, terdapat 63 sampai 64 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Kemudian untuk TPT adalah sebesar 2,78 yang berarti bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Kepulauan Sitaro yang usia 15 tahun keatas yang

6.3 Status Pekerjaan

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6.2, maka pada tahun 2019 tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro paling banyak mempunyai status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan

jumlah 9.420 jiwa. Kemudian status pekerjaan yang paling sedikit dimiliki oleh tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar yaitu hanya sebanyak 330 jiwa. Selain itu, dari Tabel 6.2 juga terlihat bahwa tenaga kerja laki-laki mendominasi seluruh status pekerjaan, kecuali pada status pekerjaan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	6.004	3.950	9.954
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	2.786	1.007	3.793
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	330	0	330
Buruh/Karyawan/Pegawai	5.205	4.215	9.420
Pekerja bebas di pertanian	2.676	223	2.899
Pekerja bebas di Non Pertanian	1.725	228	2.013
Pekerja keluarga/tak dibayar	1.334	2.117	3.451
Jumlah	20.060	11.800	31.860

Sumber: Kabupaten Kepulauan Sitaro Dalam Angka, 2020

BAB 7

POLA KONSUMSI

<https://sitirok.ab.bps.go.id>



Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi. Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (*Engel's Law*).

Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup. Namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya. Oleh karena itu, setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Salah satu aspek yang dapat mencerminkan kesejahteraan suatu rumah tangga adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga itu sendiri. Dengan melihat pengeluaran rumah tangga maka kita mampu melihat kemampuan daya beli. Kenaikan maupun penurunan kemampuan daya beli secara tidak langsung akan menggambarkan keadaan kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Berdasarkan Tabel 7.1 dapat dilihat bahwa pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas, konsumsi untuk makanan dengan bukan makanan relatif seimbang yaitu 49,96 untuk konsumsi makanan dan 50,04 untuk konsumsi bukan makanan. Kemudian untuk kelompok 40 persen tengah melakukan konsumsi makanan sebanyak 57,08 persen

dan konsumsi bukan makanan sebanyak 42,92 persen. Dan untuk kelompok 40 persen terbawah melakukan konsumsi makanan sebanyak 59,15 persen dan konsumsi bukan makanan sebanyak 40,85 persen.

Tabel 7.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Barang		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
20 Persen Teratas	49,96	50,04	100
40 Persen Tengah	57,08	42,92	100
40 Persen Terbawah	59,15	40,85	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Pada tahun 2019, pengeluaran untuk kebutuhan makanan terbesar rumah tangga selama sebulan di Kabupaten Kepulauan Sitaro secara umum adalah pada komoditas makanan dan minuman jadi. Akan tetapi apabila dilihat secara lebih rinci seperti yang terlihat pada Tabel 7.2, pada kelompok 40 persen terbawah pengeluaran terbesar untuk komoditas padi-padian yaitu sebesar 61.887 rupiah per kapita per bulannya. Kemudian untuk kelompok 40 persen tengah, rata-rata pengeluaran terbesar pada komoditas makanan dan minuman jadi yaitu 126.940 rupiah per kapita per bulannya. Untuk kelompok 20 persen teratas, pengeluaran rumah tangga terbesar juga untuk makanan dan minuman jadi dengan nilai 283.186 rupiah per kapita per bulannya. Selanjutnya untuk rata-rata pengeluaran bukan makanan terbesar di ketiga kelompok pengeluaran adalah pengeluaran untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 7.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	61.887	83.285	98.764
2. Umbi-umbian	5.998	8.942	13.335
3. Ikan/udang/ cumi/kerang	37.616	58.618	86.106
4. Daging	849	4.839	17.925
5. Telur dan susu	12.911	22.486	38.575
6. Sayur-sayuran	28.207	41.021	63.376
7. Kacang-kacangan	2.313	3.960	6.336
8. Buah-buahan	16.325	33.388	51.480
9. Minyak dan kelapa	9.770	15.041	21.520
10. Bahan minuman	11.625	17.388	24.517
11. Bumbu-bumbuan	6.344	107.	15.793
12. Konsumsi lainnya	3.613	5.365	6.004
13. Makanan dan minuman jadi	52.696	126.940	283.186
14. Rokok dan tembakau	23.104	57.282	86.629
Jumlah Makanan	273.255	489.265	813.546
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	109.305	223.519	460.981
16. Aneka barang dan jasa	48.089	82.918	169.917
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	8.954	22.333	53.078
18. Barang tahan lama	5.556	16.442	52.580
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	15.309	20.228	34.953
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1.464	2.496	43.429
Jumlah Bukan Makanan	188.677	367.936	814.939
Jumlah	461.932	857.201	1.628.485

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

BAB 8

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

<https://sitirokab.bps.go.id>



Kebutuhan pokok manusia agar dapat hidup layak selain kebutuhan pangan dan sandang adalah kebutuhan perumahan (papan). Selain sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung, baik dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman bagi penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Selain itu, rumah juga merupakan tempat berkumpul bagi para penghuninya, yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Lebih jauh lagi, rumah juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesejahteraan penghuninya. Beberapa fasilitas perumahan yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan tempat penampungan kotoran atau tinja.

Disamping itu tidak kalah pentingnya tentang syarat-syarat kesehatan yang harus dipenuhi, misalnya jarak/letak tempat buang air besar dari sumber air minum, ventilasi udara, dan sebagainya. Kualitas perumahan yang baik dan fasilitas rumah tangga yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya, sehingga pembangunan perumahan merupakan suatu upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia dan sekaligus untuk meningkatkan mutu kehidupan lingkungan, memberikan arah pada pertumbuhan daerah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

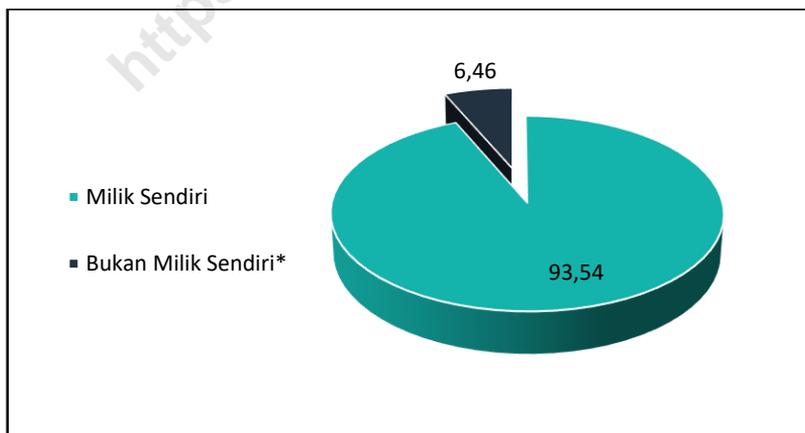
Manusia dan alam lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah, maupun buatan manusia. Alam sekitar yang kelihatannya sangat alamiah, kadang sewaktu-waktu

dapat menjadi sangat ganas. Untuk itu, manusia menciptakan tempat perlindungan berupa rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial, secara alamiah mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga berkumpul beberapa bangunan rumah tinggal dan terbentuklah suatu pemukiman rumah penduduk.

8.1 Status Kepemilikan

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah status kepemilikan rumah. Rumah tangga yang mempunyai status kepemilikan rumah sendiri relatif lebih sejahtera jika dibandingkan dengan rumah tangga yang status kepemilikan rumahnya sewa ataupun kontrak.

Grafik 8.1 Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Berdasarkan Grafik 8.1, terlihat bahwa pada tahun 2019 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Sitaro atau lebih

tepatnya 93,54 persen rumah tangga bertempat tinggal di rumahnya sendiri. Sisanya atau sekitar 6,46 persen menempati rumah kontrak/sewa, milik orang tua/sanak saudara, rumah bebas sewa, rumah dinas, dan lainnya.

8.2 Sumber Penerangan

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga serta sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya. Oleh karena itu, kondisi rumah sangat berperan dalam menentukan tingkat kenyamanan penghuninya. Kelengkapan fasilitas rumah tinggal menjadi salah satu kunci kenyamanan, fasilitas utama yang perlu dimiliki rumah tinggal salah satunya adalah sarana penerangan.

Sumber penerangan yang selama ini ada di masyarakat adalah listrik PLN dan Non PLN, petromak/aladin, pelita/sentir dan lainnya. Listrik sebagai salah satu jenis penerangan mempunyai derajat yang paling tinggi karena listrik selain sebagai penerangan juga dapat berfungsi untuk menjalankan berbagai barang elektronik setelah listrik kemudian diikuti petromak/aladin selanjutnya pelita/senter.

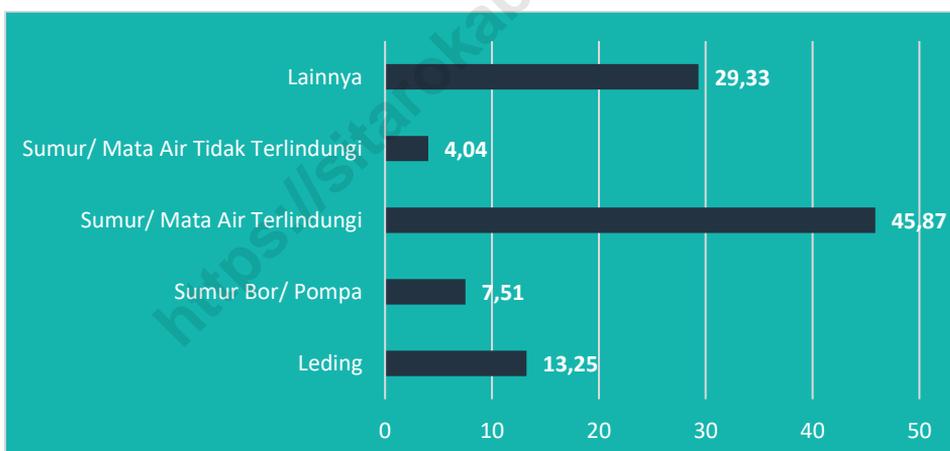
Pada tahun 2018, sumber penerangan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro didominasi oleh penerangan dari listrik PLN yaitu sekitar 89,51 persen dari total rumah tangga. Sisanya 10,49 persen menggunakan sumber penerangan dari listrik Non PLN.

Catatan: Data menggunakan data tahun 2018 dikarenakan data tahun 2019 tidak tersedia.

8.3 Sumber Air

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus-menerus diupayakan pemerintah. Sumber air bersih sangat penting karena digunakan dalam kebutuhan minum, masak, mandi, mencuci, dan lain-lain.

Grafik 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/Dll di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Pada tahun 2019, sumber air utama yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk kebutuhan mandi/ mencuci/ dll adalah sumur/mata air terlindungi dengan persentase sebesar 45,87 persen. Kemudian di posisi terbanyak kedua adalah sumber lainnya dalam hal ini air hujan dengan persentase penggunaan sebesar 29,33 persen.

8.4 Sarana Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK)

Lingkungan perumahan yang higienis secara langsung menggambarkan kondisi kesehatan penghuninya, dan sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan tercermin dari bagaimana cara hidup dengan sanitasi yang baik seperti; fasilitas buang air besar, tempat penampungan akhir limbah manusia (tinja), dan jenis jamban yang biasa digunakan.

Pada tahun 2019, persentase rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri sudah mencapai 86,54 persen dari keseluruhan rumah tangga yang berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sedangkan sisanya 13,46

persen belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri atau menggunakan fasilitas umum. Dari jumlah rumah tangga yang memiliki tempat buang air besar, 99,24 persen diantaranya telah menggunakan jenis kloset leher angsa.

Tabel 8.1 Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Penggunaan Fasilitas	Rumah Tangga
(1)	(2)
Sendiri	86,54
Lainnya*	13,46

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

BAB 9

KEMISKINAN

<https://sitirokab.bps.go.id>

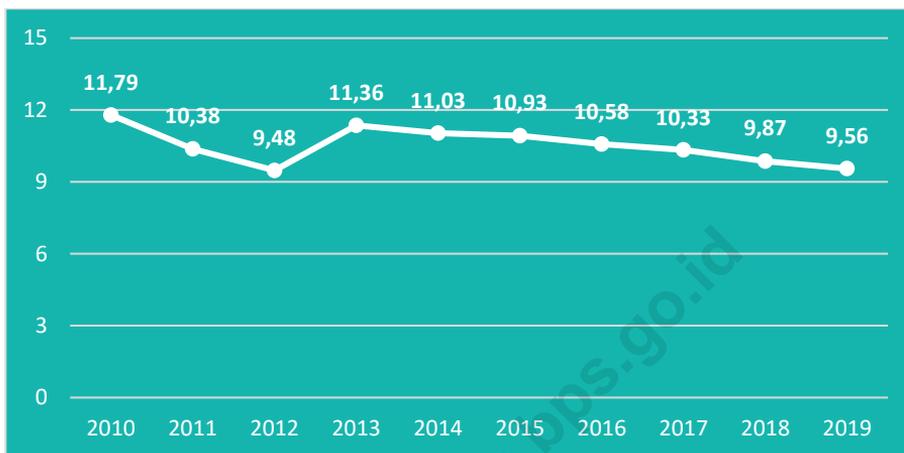


Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pemberantasan kemiskinan harus diupayakan secara berkesinambungan dan melibatkan *stakeholder* dari berbagai sektor sehingga penuntasan masalah kemiskinan dapat segera terwujud.

9.1 Persentase Kemiskinan

Konsep kemiskinan menurut BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Seperti yang terlihat pada Grafik 9.1, selama kurun waktu tujuh tahun terakhir persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro semakin mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah telah berhasil menjalankan program pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin sebesar 11,36 persen dan terus menurun hingga sebesar 9,56 persen di tahun 2019.

Grafik 9.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2010 - 2019



Sumber: *sulut.bps.go.id*, 2020

Peningkatan maupun penurunan angka kemiskinan sangat bergantung pada program-program pengentasan kemiskinan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penduduk miskin adalah penduduk yang sangat rentan dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, terutama dengan perubahan harga pada bahan makanan. Oleh karena itu, bantuan pemerintah berupa bahan makanan pokok mampu menekan angka kemiskinan, namun dengan bantuan untuk kesehatan dan pendidikan diharapkan juga mampu menanggulangi kemiskinan. Dalam jangka panjang, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan diharapkan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan dapat hidup mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

9.2 Garis Kemiskinan

Kemiskinan absolut pada umumnya diukur dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan merupakan representasi dari

jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besaran garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK.

Grafik 9.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sitaro (Rupiah), 2010-2019



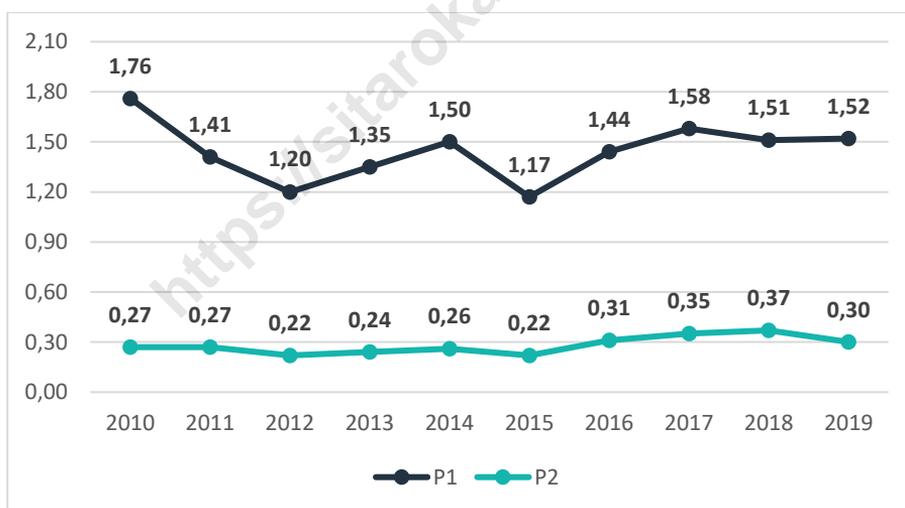
Sumber: *sulut.bps.go.id*, 2020

Berdasarkan Garfik 9.2, dapat diketahui bahwa garis kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sitaro dari 2010 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, garis kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp 220.165,- meningkat menjadi Rp 302.736,- di tahun 2019. Peningkatan garis kemiskinan ini juga dapat dipengaruhi oleh inflasi.

9.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Grafik 9.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2010-2019



Sumber: *sulut.bps.go.id*, 2020

Dari Grafik 9.3 dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari 1,51 menjadi 1,52. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Sitaro semakin menjauhi garis kemiskinan

meskipun belum terlalu signifikan. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan informasi tentang seberapa timpang pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Dari Garfik 9.3, dapat dilihat bahwa nilai P_2 di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018.

<https://sitarokab.bps.go.id>

BAB 10

SOSIAL EKONOMI LAINNYA

<https://sitirok.ab.bps.go.id>



Keadaan sosial ekonomi masyarakat lainnya yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat selain kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan, dan kemiskinan adalah akses masyarakat terhadap informasi dari luar. Selain itu, program perlindungan sosial, dan jenis jaminan sosial yang diperoleh juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek sosial lainnya yang dibahas pada bab ini utamanya yang berhubungan dengan kegiatan yang dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk. Pada umumnya, semakin banyak seseorang memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial budaya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang semakin baik, karena waktu yang ada tidak hanya digunakan untuk mencari nafkah.

10.1 Akses pada Informasi

Kegiatan sosial lainnya yang dilakukan penduduk adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akses pada informasi seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar, dan mengakses internet. Pada jaman sekarang, kemudahan akses informasi sangatlah didukung dengan adanya internet dan teknologi canggih lainnya. Oleh karena itu, semakin meleknya penduduk terhadap keberadaan telepon seluler maupun komputer serta penggunaan internet dapat menunjukkan bahwa semakin mudahnya akses informasi pada daerah tersebut untuk diperoleh.

Tabel 10.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin KRT dalam Penggunaan Teknologi Informasi Selama Tiga Bulan terakhir, 2019

Jenis Kelamin KRT	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	79,60	30,77
Perempuan	77,16	31,37
Kab. Kep. Sitaro	78,36	31,07

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Dari Tabel 10.1 dapat dilihat bahwa persentase anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki terdapat sebanyak 79,60 persen yang menggunakan HP atau komputer selama tiga bulan terakhir. Kemudian yang mengakses internet sebanyak 30,77 persen. Selanjutnya untuk anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas dengan kepala rumah tangga perempuan terdapat 77,16 persen yang menggunakan HP atau komputer dan 31,37 persen yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir.

10.2 Program Perlindungan Sosial dan Jenis Jaminan Sosial

Aspek selanjutnya yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah program perlindungan sosial serta jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Program sosial yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Pada Tabel 10.2 dapat dilihat bahwa program perlindungan sosial yang paling banyak diterima oleh

masyarakat adalah Raskin/ Rastra/ BPNT dengan persentase sebanyak 16,25 persen.

Tabel 10.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
(1)	(2)
Raskin/ Rastra/ BPNT	16,25
Program Indonesia Pintar (PIP)	1,77
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	8,28
Program Keluarga Harapan (PKH)	3,38

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sitaro, 2019

Selanjutnya untuk jaminan sosial yang diperoleh oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro dibagi kedalam dua jenis, yaitu jaminan pensiun dan asuransi/ PHK. Untuk jaminan pensiun atau jaminan hari tua, terdapat sebanyak 5,02 persen rumah tangga yang memperoleh pada tahun 2019 ini. Sedangkan untuk asuransi/ PHK terdapat sebanyak 0,62 persen rumah tangga yang memperolehnya.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sitarokab.bps.go.id>

